

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia Pascasarjana Fakultas Hukum.
- Ali, C. (2005). *Badan hukum*. Alumni.
- Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Ashsofa, B. (2000). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Bedner, A., et al. (2012). *Kajian sosio-legal*. Pustaka Larasan.
- Cavoukian, A. (2011). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Hatta, G. (2014). *Pedoman manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan*. Universitas Indonesia Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, M. C. (2022). *Metode penelitian hukum: Pendekatan yuridis sosiologis*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan studi sosiolegal dan implikasi metodologisnya*. BPHN Press.
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state* (Somardi, Trans.). Bee Media Indonesia.
- Kuncoro. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Miru, A. (2011). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Moeleong, L. J. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Universitas Mataram Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rosadi, S. D. (2018). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.
- Satrio, J. (2014). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Alumni.
- Satrio, J. (2015). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum perdata Indonesia*. Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sugiarti, I., Satria, B., & Sukawan, A. (2023). *Etika dan hukum kesehatan: Penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit*. R-STATS Press.
- Sukmadinata. (2006). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad, W. (2004). *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar, metoda, teknik*. Tarsito.

Syahrani, R. (2000). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Alumni.

Tutik, T. T. (2010). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Elsam dan Huma.

## ARTIKEL

Armia, M. S. (2022). *Buku metode penelitian*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC. (2019). Anthem data breach settlement: Lessons learned in healthcare data recovery. *Healthcare Privacy Law Review*, 15(4), 23. <https://www.cohenmilstein.com/case-study/anthem-data-breach-litigation/>

Djafar, W. (2023). Implementasi hak pemulihan data dalam UU PDP: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(2), 8.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Harvard Law Review. (2018). Measuring harm in privacy cases: The challenge of intangible losses. *Harvard Law Review*, 131(6), 165.

Komisi Informasi Pusat. (2024). Analisis implementasi hak pemulihan data di Indonesia. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, 8(1), 7.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2023). *Evaluasi penanganan kasus kebocoran data BPJS: Dua tahun kemudian*. Laporan Penelitian.

Martin, P. W., & Bruce, T. (2005). Legal information institute: A brief history. *Cornell Law Review*, 90(5), 1273.

Mayasari, N. (2020). Sosialisasi pengetahuan tentang nilai guna rekam medis. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 336. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/download/92/85/>

Nuryadi, D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2). <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 3. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-27-tahun-2022>

Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia. (2025). Dandapala.

Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data. (2025). *Jurnal Ilmu Riset Sosial*.

Penegakan Hukum terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit. (2025). *Iustitia Omnibus*.

Pusat Studi Keamanan Siber Universitas Indonesia. (2023). Konsep pemulihan data dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Teknologi Hukum*, 12(3), 15.

Relevansi Hukum Progresif terhadap Pembangunan Hukum Islam. (2024). Institut Ilmu Manajemen Surakarta.

Rhiti, H. (2016). Landasan filosofis hukum progresif. *Justitia et Pax*, 32(1), 45.

Samin, H. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 8.

Siregar. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Warassih, E. (2005). *Pranata hukum sebuah telaah sosiologis*. Surat Bahasa Semarang.

Wiratraman, H. P. (2012). Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya. Dalam A. Bedner et al. (Ed.), *Kajian sosio-legal* (hal. 56). Pustaka Larasan.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pasal 1 angka 1 dan 2; Pasal 13; Pasal 38 ayat 1 dan 2; Pasal 39; Pasal 39 ayat 2; Pasal 40 ayat 2; Pasal 54. Konsiderans Menimbang huruf a) dan b).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 14 ayat 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 296.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 5 ayat 2; Pasal 10 dan Pasal 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat (1) dan angka (6); Pasal 3; Pasal 20-34; Pasal 27-31; Pasal 40; Pasal 57-60; Pasal 65; Pasal 67 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 48.

#### **LAPORAN DAN DOKUMEN RESMI**

Anthem Inc. (2015). *Data breach investigation report: Analysis of healthcare data security incident*. hlm. 15-23.

BPJS Kesehatan. (2020). *Laporan tahunan 2020*. BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Hasil penelusuran dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Pedoman gugatan perwakilan kelompok dalam kasus kebocoran data*. Surat Edaran No. 4 Tahun 2023.

Office for Civil Rights. (2013). *HITECH Act enforcement interim final rule*. U.S. Department of Health and Human Services.

Office for Civil Rights. (2013). *HIPAA enforcement and corrective action: A comprehensive guide*. U.S. Department of Health and Human Services.

United States District Court for the Northern District of California. (2018). *In re Anthem, Inc. Data Breach Litigation*, Case No. 15-md-02617, Final Approval Order.

*United States District Court for the Northern District of California. (2018). In re Anthem, Inc. Data Breach Litigation, Case No. 15-md-02617, Final Settlement Agreement.*

U.S. Department of Health and Human Services. (2013). *HIPAA security rule guidance material*. Government Printing Office.

U.S. Department of Health and Human Services. (2024). *Healthcare data breach response and recovery framework*. Government Publishing Office.

#### **WEBSITE/PORTAL ONLINE**

*Administrative Office of the United States Courts. (2024). Public access to court electronic records. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://pacer.uscourts.gov/>*

BBC Indonesia. (2021). BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor. Diakses 20 Mei 2021, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>

Cornell Law School. (2024). Federal law collection. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.law.cornell.edu/federal>

Healthcare Dive. (2018). Anthem shells out \$16M in largest ever HIPAA fine. Diakses 20 Januari 2025, dari <https://www.healthcaredive.com/news/anthem-shells-out-16m-in-largest-ever-hipaa-fine/539791/>

Gibony. (1991). *Medical record management*.

HIPAA Journal. (2018). 16 million Anthem HIPAA breach settlement takes OCR HIPAA penalties past \$100 million mark. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://www.hipaajournal.com/16-million-anthem-hipaa-breach-settlement/>

HIPAA Journal. (2025). What are the HIPAA breach notification requirements? Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.hipaajournal.com/hipaa-breach-notification-requirements>

ICHA. (2023). Perbedaan antara electronic medical record (EMR) dengan electronic health record (EHR). Diakses 22 Januari 2026, dari <https://icha.co.id/perbedaan-antara-electronic-medical-record-emr-dengan-electronic-health-record-ehr.html>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Hasil penelusuran dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia. Diakses 23 Agustus 2025, dari <https://www.kominfo.go.id/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Data BPJS Kesehatan diduga bocor, Menteri Tjahjo dukung Kemkominfo usut tuntas. Diakses 22 Mei 2021, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>

Kompas.com. (2021). Kemenkominfo duga 279 juta data penduduk yang bocor identik dengan data BPJS. Diakses 20 Agustus 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/15192491/kemenkominfo-duga-279-juta-data-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-data-bpjs>

KSATRIA Health. (2025). Perbedaan antara EMR dan EHR. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.ksatria.io/id/sistem-rme-rke/perbedaan-antara-emr-dan-ehr/>

LNG Risk. (2025). Landasan hukum BPJS Kesehatan. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://lngrisk.co.id/glosari/landasan-hukum-bpjs-kesehatan/>

MIK UMSIDA. (2025). Peran ISO 27001 dalam melindungi data kesehatan. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://mik.umsida.ac.id/peran-iso-27001-dalam-melindungi-data-kesehatan/>

Office for Civil Rights. (2024). HIPAA enforcement and corrective action. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/compliance-enforcement/index.html>

U.S. Department of Health and Human Services. (2024). HIPAA for professionals. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.hhs.gov/hipaa/index.html>

U.S. Government Publishing Office. (2024). *Code of federal regulations*. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.govinfo.gov/app/collection/CFR>

U.S. Securities and Exchange Commission. (2024). EDGAR - Search and access. Diakses 22 Januari 2026, dari <https://www.sec.gov/edgar.shtml>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Edisi kelima*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **STANDAR INTERNASIONAL**

International Organization for Standardization. (2019). *ISO/IEC 27701:2019 Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management*. ISO.

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems*. ISO.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AMERIKA SERIKAT (U.S. FEDERAL REGULATIONS)**

45 CFR Part 160 and Part 164, Subparts A and C (HIPAA *Privacy Rule* dan *Breach notification Rule*).

45 CFR Part 160 and Part 164, Subparts A and E (HIPAA *Security Rule*).

Pasal 160.103 dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan definisi HIPAA).

Pasal 160.404 dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan tentang struktur dan besaran sanksi denda administratif HIPAA).

Pasal 164.308, Pasal 164.310, dan Pasal 164.312 dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan HIPAA *Security Rule*: administrative, physical, dan *technical safeguards*).

Pasal 164.504 huruf (e) dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan HIPAA tentang *Business Associate Agreement*).

Pasal 164.504 huruf (e) angka (2) dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan unsur minimum *Business Associate Agreement*).

Pasal 164.524 dan Pasal 164.526 dalam Title 45 *Code of Federal Regulations* (Ketentuan HIPAA *Privacy Rule* tentang hak individu untuk mengakses data kesehatan).

Pasal 1320d-6 dalam Title 42 United States Code (Ketentuan pidana federal atas pelanggaran HIPAA).

## **WAWANCARA**

Chomariyah, Prof. Dr., S.H., M.H. (2025). Akademisi & praktisi hukum siber internasional. Hasil wawancara.

Huda, Prof. Dr. Mokhamad Khoirul, S.H., M.H., CMC., CCD. (2025). Ahli hukum perdata dan data pribadi. Hasil wawancara.

Khabibie, Muhammad, S.Kom., M.Kom. (2025). Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara.

Mayasari, Jayanti, S.H. (2025). Staf hukum dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara.

Saputro, Angga, S.T., M.T. (2025). Staf bidang IT BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur. Hasil wawancara.